

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011.

Dari hasil analisis Pendapatan Pajak Daerah yang telah dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klasen maka disimpulkan Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011 untuk Kuadran I tidak ada sumber Pendapatan Pajak Daerah yang termasuk dalam Kuadran I (Sumber Unggulan), karena dari ketiga sumber tersebut tidak ada yang memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi. Yang termasuk dalam Kuadran II (Sumber Berkembang) adalah Pajak Hiburan, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Yang termasuk dalam Kuadran III (Sumber Potensial) adalah Pajak Penerangan Jalan, dimana pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Yang termasuk dalam Kuadran IV (Sumber Terbelakang) adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Pajak Reklame, dan Pajak Bahan Golongan C, dimana keempat sumber

Pendapatan Pajak Daerah tersebut memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang rendah.

2. Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012.

Dari hasil analisis Pendapatan Pajak Daerah yang telah dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klasen maka disimpulkan Pemetaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2012 dalam Kuadran I (Sumber Unggulan) adalah Pajak Penerangan Jalan, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi. Yang termasuk dalam Kuadran II (Sumber Berkembang) adalah Pajak Bahan Golongan C, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Yang termasuk dalam Kuadran III (Sumber Potensial) adalah Pajak BPHTB, dimana pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Yang termasuk dalam Kuadran IV (Sumber Terbelakang) adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir, dimana kelima sumber Pendapatan Pajak Daerah tersebut memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang rendah.

3. Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011.

Dari hasil analisis Pendapatan Retribusi Daerah yang telah dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klasen maka dapat disimpulkan Pemetaan

Pendapatan Retribusi Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011 yang termasuk dalam Kuadran I (Sumber Unggulan) adalah Pajak Perizinan tertentu, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi. Dan untuk kuadran II tidak ada sumber Pendapatan Pajak Daerah yang termasuk dalam Kuadran II (Sumber Berkembang), karena dari ketiga sumber tersebut tidak ada yang memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi. Yang termasuk dalam Kuadran III (Sumber Potensial) adalah Retribusi Perizinan Tertentu, dimana pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Yang termasuk dalam Kuadran IV (Sumber Terbelakang) adalah Retribusi Jasa Usaha dimana sumber Pendapatan Retribusi Daerah ini memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang rendah.

4. Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012.

Dari hasil analisis Pendapatan Retribusi Daerah yang telah dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klasen maka disimpulkan Pemetaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2012 yang termasuk dalam Kuadran I (Sumber Unggulan) adalah Retribusi Jasa Umum, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi. Yang termasuk dalam Kuadran II (Sumber Berkembang) adalah Retribusi Jasa Usaha, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang

tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Yang termasuk dalam Kuadran III (Sumber Potensial) adalah retribusi Perizinan Tertentu, dimana pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Dan untuk kuadran IV tidak ada sumber Pendapatan Pajak Daerah yang termasuk dalam Kuadran II (Sumber Berkembang), karena dari ketiga sumber tersebut tidak ada yang memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang rendah.

6.2 Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Kupang perlu memperhatikan peluang-peluang yang ada dalam Kota Kupang guna untuk mendorong peningkatan penerimaan sumber Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
2. Untuk sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dikategorikan ke dalam kategori Sumber Unggulan, Sumber Potensial, Sumber Berkembang, maupun Sumber Terbelakang, tetap harus diperhatikan dan ditingkatkan penerimaan pendapatan serta dilakukan pemantauan intensif terhadap setiap kategori masing-masing sumber agar dapat ditingkatkan lagi realisasinya dari tahun ke tahun.
3. Untuk dapat mencapai hasil pencapaian berdasarkan hasil perhitungan estimasi yang dilakukan, Pemerintah Daerah Kota Kupang perlu

mengoptimalkan kinerjanya dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi daerah agar dapat mencapai prakiraan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra.2001.*Akuntansi Sektor di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Halim,Abdul.2012. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Revisi,Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo,2006. *Perpajakan*, Edisi Revisi-Ed.XIV. Yokyakarta: Penerbit Andy.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Munir, Dasril. 2014. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. YPAPI, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nugroho, Riant D. 2000. *Otonomi ;Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Poerwadarminta. 1994. *Kamus Bahasa Indonesia*
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Riwu Kaho, Yosef. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo, Cetakan Keempat.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pustaka Pergaulan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.